

PROBLEMATIKA PENYERAGAMAN HUKUM MARITIM PERDATA DAN PENYELARASANNYA KE DALAM HUKUM NASIONAL

Aktieva Tri Tjitrawati
Fakultas Hukum
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Abstrak

Berbagai problematika penyeragaman dan penyelarasan hukum maritim perdata akan mewujudkan penegasan efisiensi dan kepastian hukum dalam melakukan aktivitas kemaritiman internasional, penyeragaman hukum juga mendorong terselenggaranya keadilan dan ketertiban sebagai prinsip utama dalam hukum perdata internasional, implikasi negarayang timbul dari penyeragaman ini bagi negara peserta perjanjian internasional. Konstruksi berfikir dan konsep hukum yang sudah terbangun menurut hukum peserta tersebut. Menerima konstruksi hukum yang berbeda akan mengganggu konstruksi berpikir hukum negara tersebut mengenai masalah tertentu.

Kata kunci : hukum maritim, hukum nasional

Abstract

Various problems of uniformity and alignment of civil maritime law will embody the assertion efficiency and legal certainty in melakukan international maritime activity, the uniform law also encourages the implementation of justice and order as a main principle in civil law international, negarayang implications arising from this uniformity for the participating countries of international agreements. Construction of thinking and legal concepts that have been built according to the law of the participant. Receiving a different legal construction would disrupt the construction of state law thinks about certain issues.

Keywords: maritime law, national law

PENDAHULUAN

Pengangkutan manusia dan barang melalui laut secara internasional dewasa ini meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan secara tajam terjadi pada tahun 2004 yaitu mencapai 6,76 milyar ton barang yang dimuat, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata dari tahun 2001 sampai 2005 sebesar 4,3 persen per tahun. (OECD, 2005) Besarnya arus perdagangan itu tentunya menuntut adanya penyelenggaraan jasa pengangkutan yang

efisien, dan efisiensi akan mudah tercapai jika terselenggara sistem administrasi yang dilandasi kerangka hukum penyelenggaraan transportasi laut yang memadai.

Salah satu cara mencapai bentuk efisiensi adalah adanya keseragaman ketentuan hukum yang mengatur aktivitas pelayaran dan hubungan hukum diantara para pelakunya. Keseragaman aturan melahirkan kepastian, efektivitas dan efisiensi,